

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan kota yang ditetapkan, maka kebijakan umum dirumuskan sebagai agenda dan program pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

7.1 Kebijakan Umum dan Agenda Pembangunan Kota

7.1.1 Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- (1) Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan;
- (2) Peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peningkatan keterbukaan, dan akuntabilitas publik;
- (4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan ;
- (5) Peningkatkan efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah.

7.1.2 Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota, maka agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- (1) Peningkatkan keselarasan program pusat dan daerah;
- (2) Peningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota.

7.1.3 Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan ditetapkan agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- (1) Peningkatan produktifitas dan inovasi daerah;
- (2) Peningkatan penanaman modal daerah serta kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan;
- (3) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian kota;
- (4) Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja;
- (5) Peningkatan fungsi dan peranan sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi kota;
- (6) Peningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan serta barang daerah.

7.1.4 Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- (1) Peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup;
- (2) Peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
- (3) Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, aman dan damai

7.1.5 Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat kota, maka agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- (1) Penanggulangan kemiskinan
- (2) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
- (3) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
- (4) Peningkatan partisipasi masyarakat, pemuda serta prestasi olahraga daerah
- (5) Peningkatan kualitas budaya
- (6) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam pembangunan kota guna mewujudkan norma keluarga kecil sejahtera

7.2 Program Pembangunan Kota

7.2.1 Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program pokok sebagai berikut:

- (1) Bimtek Sistem Teknologi Informasi Pajak Daerah
- (2) Hubungan Luar Negeri dan Sister City
- (3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- (4) Kerjasama Pembangunan
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- (6) Penataan Daerah Otonomi Baru
- (7) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- (8) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- (9) Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
- (10) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- (11) Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (12) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (13) Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
- (14) Peningkatan Kualitas Diklat
- (15) Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
- (16) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
- (17) Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keuangan Daerah
- (19) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
- (20) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan
- (21) Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
- (22) Penyusunan Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan
- (23) Sekretariat DPRD

- b. **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**, dengan program pokok sebagai berikut:
 - (1) Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 - (2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

- c. **Urusan Wajib Kearsipan**, dengan program pokok sebagai berikut:
 - (1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
 - (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - (3) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - (4) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

- d. **Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil**, dengan program pokok sebagai berikut:
 - (1) Penataan Adm. Kependudukan

- e. **Urusan Wajib Penanaman Modal**, dengan program pokok sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan Daya Saing Dan Pelayanan Umum
 - (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

- f. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**, dengan program pokok sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan Rencana Tata Ruang
 - (2) Pengembangan Data/Informasi
 - (3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 - (4) Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (5) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - (6) Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011–2015 pada misi pertama disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.1 Misi Kesatu:
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kota Medan Tahun 2011-2015

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang ekonomi. ▪ Meningkatnya efektivitas tindak lanjut konsultasi antara pemerintah kota dengan pemerintah propinsi dan pemerintah ▪ Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah tingkat atasan ▪ Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, dan kepada pemerintah propinsi serta pemerintah • Peningkatan kerja sama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kerjasama antar daerah ▪ Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Medan ▪ Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah propinsi ▪ Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah ▪ Jumlah urusan wajib/pilihan yang sudah diterapkan SPM –nya 	6	11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan Luar Negeri dan Sister City ▪ Kerjasama Pembangunan ▪ Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah ▪ Pengembangan Pemasaran Pariwisata ▪ Pembangunan Rencana Tata Ruang ▪ Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Perencanaan Pembangunan Ekonomi ▪ Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintahan Umum ▪ perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian Hubungan Kerjasama ▪ Badan Penelitian dan Pengembangan dan ▪ Bappeda
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan ▪ Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan waktu penyampaian LPPD ▪ Ketepatan waktu penyampaian laporan ▪ Jumlah pertemuan konsultasi publik ▪ Waktu penyelesaian perda tentang 	Tepat	Tepat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Daerah Otonomi Baru ▪ Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otonomi daerah ▪ Pemerintahan umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penelitian dan Pengembangan ▪ Bagian Humas, Bagian Administra

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya konsultasi publik antar Pemerintah Kota Medan dengan DPRD 		<ul style="list-style-type: none"> standar pelayanan umum ▪ Waktu Penyelesaian perda tentang konsultasi publik ▪ Jumlah perda yang ditetapkan ▪ Jumlah perwal/aturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan ▪ Jumlah rancangan perda yang disusun ▪ Jumlah ranperda inisiatif eksekutif ▪ Jumlah ranperda inisiatif legislatif ▪ Jumlah Ranperda yang disetujui pemerintah tingkat atasan ▪ Jumlah pengambilan keputusan DPRD secara aklamasi/mufakat 	<ul style="list-style-type: none"> 5 - 111 25 25 3 10 25 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 7 10 120 40 40 6 21 125 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah ▪ Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 		<ul style="list-style-type: none"> si Pemerintahan Umum ▪ Bagian Perencanaan dan Asset
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ▪ Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik ▪ Tersedianya peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai dasar kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah • Peningkatan pembinaan hukum daerah • Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu penyelesaian perda tentang standar pelayanan umum ▪ Waktu Penyelesaian perda tentang konsultasi publik ▪ Jumlah perda yang ditetapkan ▪ Jumlah perwal/aturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 111 25 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 120 30 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Peraturan Perundang-undangan ▪ Penataan Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintahan umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian Hukum ▪ Badan Penelitian dan Pengembangan ▪ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum ▪ Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan (hak inisiatif eksekutif – legislatif) ▪ Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD ▪ Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara kota-propinsi-pusat. ▪ Tersedianya regulasi ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rancangan perda yang disusun ▪ Jumlah ranperda inisiatif eksekutif ▪ Jumlah ranperda inisiatif legislatif ▪ Jumlah Ranperda yang disetujui pemerintah tingkat atasan ▪ Jumlah pengambilan keputusan DPRD secara aklamasi/ musyawarah mufakat 	25	40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama Informasi Dengan Mass Media ▪ Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa ▪ Kerjasama Informasi Dengan Mass Media ▪ Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Bagian Humas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ▪ Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ▪ Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik ▪ Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel ▪ Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ▪ Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kota Medan secara periodik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis opini BPK ▪ Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti ▪ Jumlah laporan keuangan SKPD ▪ Jumlah SKPD yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik ▪ Jumlah kasus KKN yang diproses aparaturnya penegak hukum ▪ Survei audit kinerja pemerintah kota 	72	72	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur ▪ Peningkatan Kualitas Diklat ▪ Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur ▪ Peningkatan Kualitas Diklat ▪ Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan ▪ Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan ▪ Penyusunan Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Kantor Diklat

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya publikasi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat ▪ Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat diakses oleh masyarakat ▪ Rasio wartel/warnet terhadap penduduk tahun 2015 menjadi 8,22% ▪ Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal tahun 2015 menjadi 24 surat kabar ▪ Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal tahun 2015 menjadi 64 siaran ▪ Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum ▪ Diterapkannya e-procurement dalam pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah • Menerapkan e-procurement 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah ▪ Jumlah wartel/warnet ▪ Jumlah surat kabar nasional/lokal ▪ Jumlah radio/tv lokal ▪ SIM indikator kinerja pelayanan umum ▪ Jumlah SIM yang dikembangkan ▪ Publikasi LPPD ▪ Penerapan eprocurement 	11	15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah ▪ Pengembangan Data/Informasi ▪ Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepegawaian ▪ perencanaan pembangunan 	Bagian kepegawaian Bappeda
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 99,4% ▪ Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran tahun 2015 menjadi 46,39% ▪ Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk kepastian biaya. ▪ Terlaksananya system nomor induk kependudukan (NIK) dan system informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) khususnya pada aplikasi KTP/KK tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan • Meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kepemilikan KTP ▪ Jumlah penduduk ber-KTP ▪ Jumlah kepemilikan akta kelahiran ▪ Jumlah bayi ber-akta kelahiran ▪ Jumlah pasangan ber-akta nikah ▪ Ketersediaan SOP pelayanan kependudukan ▪ Implementasi NIK dan SIAK 	97	99,4	Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kependudukan dan catatan sipil 	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			1.669.669	1.728.288			
			27,11%	46,39%			
			28,57%	100%			
			50%	100%			
			X	V			
			X	V			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan standar kompetensi jabatan ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian ▪ Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang terisi tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi dalam struktur organisasi SKPD ▪ Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD ▪ Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip secara baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah • Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil • Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja • Mengembangkan budaya birokrasi lokal • Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi pelaksanaan standar kompetensi jabatan ▪ Implementasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian ▪ struktur jabatan dan eselonering yang terisi ▪ jabatan fungsional yang diisi ▪ Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ▪ Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengarsipan 	V	V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi ▪ Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah ▪ Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otda, Pemum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 	BKD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal tahun 2015 menjadi 100 % ▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan tahun 2015 menjadi 100% ▪ Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai minimal 5% dari PAD. 	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal ▪ Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ▪ Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ▪ Jumlah anggaran peningkatan kapasitas pegawai 	1.645	1.645		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepegawaian 	BKD
			900	1.645			
			1.300	1.645			
			8.357.166.500	12.535.749.750			

Sumber : SKPD Kota Medan, 2010 (Diolah)

7.2.2 Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota, maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. **Urusan Wajib Perumahan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Kawasan Kumuh
 - (2) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - (3) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (5) Rumah Tangga Bersanitasi

- b. **Urusan Wajib Pekerjaan Umum** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - (2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - (3) Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
 - (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - (5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
 - (6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong

- c. **Urusan Wajib Perhubungan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - (3) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - (4) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kend. Bermotor
 - (5) Peningkatan Pelayanan Angkutan

- d. **Urusan Wajib Lingkungan Hidup** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Lampu Penerangan Jalan Umum
 - (2) Pengelolaan Areal Pemakaman
 - (3) Pengelolaan Reklame
 - (4) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth).

- e. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan
 - (2) Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 - (3) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 pada misi kedua disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7.4 Misi Kedua:
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sesuai PP 38/2007 ▪ Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan 11asional tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya rasio program 11asional yang dilaksanakan oleh SKPD tahun 2015 menjadi 100% ▪ Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pemrograman dengan pemerintahan tingkat atasan ▪ Meningkatkan singkronisasi dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, dengan pemerintah propinsi dan dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah urusan wajib yang dilaksanakan ▪ Jumlah urusan pilihan yang dilaksanakan ▪ Kesesuaian prioritas pembangunan kota dengan nasional ▪ Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD ▪ Jumlah SOP yang ditetapkan oleh Pemko Medan 	23	23	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Rencana Tata Ruang Dan Bangunan ▪ Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya ▪ Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 	Perencanaan pembangunan	Bappeda
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2015 menjadi 97,74% ▪ Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan tahun 2015 menjadi 0,16% ▪ Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana jalan, jalan tol, under pass, jalan layang, jalan lingkak luar ▪ Meningkatkan pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi dan lalu lintas yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ panjang jalan kota dalam kondisi baik ▪ Rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan ▪ Pertumbuhan jumlah orang melalui pelabuhan laut ▪ Pertumbuhan jumlah orang 	95%	95,64%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan Dan Jembatan ▪ Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong ▪ Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan 	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			2	2			
			100%	100%			
			80%	100%			
			3	15			
			0,19	0,16			
			2,32%	10%			
			2,72%	10%			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<p>jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal menjadi 9.651.642 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal ▪ Meningkatnya jumlah angkutan darat tahun 2015 menjadi 42.133 unit ▪ Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum ▪ Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk ▪ Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum ▪ Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/udara/terminal bis untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pengembangan kepelabuhanan laut dan udara ▪ Mengembangkan sistem informasi pembangunan kota yang terintegrasi ▪ Mengembangkan standar pelayanan kota ▪ Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir 	<p>melalui bandara udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan jumlah orang melalui terminal ▪ Pertumbuhan jumlah barang melalui pelabuhan laut ▪ Pertumbuhan jumlah barang melalui bandara udara ▪ Pertumbuhan jumlah barang melalui terminal ▪ Pertumbuhan angkutan darat ▪ Pertumbuhan arus penumpang angkutan umum ▪ Rasio izin trayek per jumlah penduduk ▪ jumlah angkutan umum yang diuji kir ▪ Status pelabuhan laut internasional ▪ Status pelabuhan udara internasional ▪ Status terminal bis bertipe-A 	0,31%	10%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan ▪ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan ▪ Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong ▪ Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan ▪ Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan ▪ Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas ▪ Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kend. Bermotor ▪ Peningkatan Pelayanan Angkutan ▪ Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			1,3%	10%			
			1,2%	10%			
			1,1%	7%			
			6,25%	4,76%			
			7%	10%			
			0,012	0,010			
			V	V			
			V	V			
			V	V			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya rumah tangga bersanitasi tahun 2015 menjadi 70% ▪ Meningkatnya ketersediaan daya listrik tahun 2015 menjadi 99,14% ▪ Menurunnya persentase kawasan kumuh ▪ Meningkatnya rasio TPU per satuan penduduk ▪ Meningkatnya rasio permukiman layak huni tahun 2015 menjadi 89,28% ▪ Meningkatnya jumlah hidran kota yang dpt digunakan tahun 2015 sebanyak 123 titik ▪ Meningkatkan jumlah lahan untuk pembangunan pospemadam kebakaran tahun 2015 menjadi 4 lokasi ▪ Meningkatnya jumlah armada pemadam kebakaran tahun 2015 sebanyak 16 unit ▪ Meningkatnya jumlah reservoir air kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman ▪ Mendorong peningkatan pembangunan prasarana dan sarana listrik dan telekomunikasi ▪ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum kota ▪ Meningkatkan jumlah lokasi siap bangun untuk pos pemadam kebakaran ▪ Meningkatkan jumlah armada kebakaran ▪ Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ketersediaan daya listrik (watt) ▪ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum ▪ Jumlah rumah tangga bersanitasi ▪ Luas kawasan kumuh ▪ Rasio permukiman layak huni ▪ Jumlah hidran yang dapat digunakan ▪ Jumlah lahan siap bangun untuk pos pemadam kebakaran ▪ Jumlah armada kebakaran yang dapat digunakan ▪ Jumlah reservoir air kebakaran 	<p>1.306.785</p> <p>240.875</p> <p>252.657</p> <p>2,36%</p> <p>79,98%</p> <p>28</p> <p>0</p> <p>23</p> <p>4</p>	<p>1.597.814</p> <p>247.090</p> <p>247.090</p> <p>0,79%</p> <p>89,28%</p> <p>151</p> <p>4</p> <p>39</p> <p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Kumuh ▪ Pendidikan Dan Pelatihan Formal ▪ Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ▪ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ▪ Rumah Tangga Bersanitasi ▪ Lampu Penerangan Jalan Umum ▪ Pengelolaan Areal Pemakaman ▪ Pengelolaan Reklame ▪ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumahan ▪ Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman ▪ Dinas Pertamanan Kota Medan

7.2.3 Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam melaksanakan dengan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. **Urusan Wajib Ketenagakerjaan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - (2) Pembinaan Hubungan Industrial Yang Standar/Ideal
 - (3) Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
 - (4) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - (5) Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga Yang Berkompetensi

- b. **Urusan Wajib Koperasi dan UMKM** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Penciptaan Iklim Usaha UMKM Yang Kondusif
 - (2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
 - (3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Umkm
 - (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- c. **Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** dengan Program sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pk-5) dan Asongan
 - (2) Pengembangan Data/Informasi
 - (3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - (4) Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - (5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (6) Peningkatan Ketahanan Pangan
 - (7) Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
 - (8) Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

- d. **Urusan Wajib Penanaman Modal** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pengembangan Kebudayaan, Inovasi, Teknologi, Tepat Guna Informasi dan Komunikasi Serta Kerjasama Regional
 - (2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - (3) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - (4) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

- e. **Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Pengembangan IKM
 - (2) Pengembangan Sentra Industri Potensial
 - (3) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - (4) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Teknologi
 - (5) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - (6) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
 - (7) **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
 - (8) **Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.**
- f. **Urusan Pilihan Pertanian dan Kelautan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - (3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - (4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - (5) Pengembangan Budidaya Perikanan
 - (6) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
 - (7) Pengembangan Perikanan Tangkap
 - (8) Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
 - (9) Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
 - (10) Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - (11) Peningkatan Ketahanan Pangan
 - (12) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - (13) Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
 - (14) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - (15) Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian/Perkebunan
 - (16) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - (17) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - (18) Promosi dan Investasi

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 pada misi ketiga disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7.3. Misi Ketiga:
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,28 persen per tahun sampai dengan tahun 2015 ▪ Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 menjadi Rp 114,96 trilyun ▪ Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2015 menjadi Rp 49,34 trilyun ▪ Tercapainya pendapatan per kapita tahun 2015 menjadi Rp 52,01 juta ▪ Terkendalinya laju infasi rata-rata per tahun sampai dengan tahun 2015 di bawah 1 (satu) digit. ▪ Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 3,35 trilyun ▪ Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 9,62 trilyun ▪ Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 16,55 trilyun ▪ Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri per tahun dalam perekonomian kota tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan tata kelola ekonomi kota ▪ Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh ▪ Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler ▪ Mengembangkan potensi ekonomi kota ▪ Meningkatkan kebutuhan pangan yang lebih beragam dan berkualitas ▪ Meningkatkan akses prasarana dan sarana fisik kegiatan ekonomi daerah ▪ Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah ▪ Restrukturisasi BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ PDRB atas dasar harga berlaku ▪ PDRB atas dasar harga konstan 2000 ▪ pendapatan per kapita ▪ laju infasi ▪ kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ▪ kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ▪ kontribusi sektor industri terhadap PDRB ▪ kontribusi hasil sektor industri terhadap total ekspor ▪ kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ▪ ekspor bersih perdagangan ▪ produksi bahan pangan (beras) per tahun ▪ jumlah produksi perikanan ▪ jumlah rata-rata konsumsi ikan 	<p>6,6%</p> <p>Rp 78,2 T</p> <p>Rp 35,5 T</p> <p>Rp 35,7 T</p> <p>7,65</p> <p>Rp 2,28 T</p> <p>Rp 5,09 T</p> <p>Rp 11,26 T</p> <p>58,02%</p> <p>Rp 17,27 T</p> <p>US\$ 3,74M</p> <p>4,5ton</p> <p>72.240 ton</p> <p>22,5 kg</p>	<p>8,8%</p> <p>Rp 114,9 T</p> <p>Rp 49,3 T</p> <p>Rp 52 T</p> <p>2,12</p> <p>Rp 3,35 T</p> <p>Rp 9,62 T</p> <p>Rp 16,55 T</p> <p>66,02%</p> <p>Rp 25,22 T</p> <p>US\$ 5,59M</p> <p>4,75 ton</p> <p>78.906 ton</p> <p>23,33 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan ▪ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ▪ Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan ▪ Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak ▪ Pengembangan Budidaya Perikanan ▪ Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau Dan Air Tawar ▪ Pengembangan Perikanan Tangkap ▪ Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan ▪ Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian dan Kelautan ▪ Pedagangan dan perindustrian ▪ Kebudayaan dan Pariwisata ▪ Pemerintahan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Pertanian dan Kelautan ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ▪ Badan Penelitian dan Pengembangan ▪ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ▪ Bagian Adm. Perekonomian Setda Kota Medan ▪ Bagian Sumberdaya Alam Setdakot Medan ▪ Bagian hubungan Kerjasama Setdakot Medan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap total ekspor tahun 2015 ▪ Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 25,22 triliun ▪ Meningkatnya ekspor bersih perdagangan tahun 2015 menjadi US\$ 7,94 miliar ▪ Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 113,22 ton ▪ Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2015 menjadi 78.906 ton ▪ Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan tahun 2015 menjadi 23,33kg/kapita/tahun ▪ Meningkatnya pengelolaan sumber daya air ▪ Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan ▪ Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2015 menjadi Rp 449.704 ▪ Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan tahun 2015 menjadi 43,57% ▪ Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD dalam perekonomian kota ▪ Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan pendapatan daerah 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target produksi perikanan ▪ Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ▪ Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan ▪ produktivitas total daerah tahun 2015 	79,37%	81,26%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut ▪ Peningkatan Kesejahteraan Petani ▪ Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan ▪ Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan ▪ Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ▪ Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian/Perkebunan ▪ Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ▪ Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan ▪ Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 		
			72.345 ton	76.480 ton			
			Rp 295.547	Rp 449.704			
			31,41%	43,57%			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Teknologi ▪ Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ▪ Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan ▪ Prog. Penataan Peraturan Perundang-Undangan ▪ Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2015 menjadi 96 investor baru ▪ Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2015 menjadi 19% ▪ Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2015 menjadi 23% ▪ Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2015 menjadi 96 persetujuan. ▪ Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk setiap jenis perijinan ▪ Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim perekonomian kota ▪ Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis elektronik ▪ Mengembangkan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal ▪ Meningkatkan singkonisasi regulasi investasi pusat dan daerah ▪ Pengembangan e-government di bidang investasi ▪ Mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang penanaman modal ▪ Mengembangkan kawasan ekonomi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah investor berskala nasional PMDN dan PMA ▪ nilai realisasi PMDN ▪ nilai realisasi PMA ▪ jumlah persetujuan investasi ▪ angka indeks rata-rata lama proses perijinan ▪ Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha yang kondusif ▪ Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ▪ Jumlah perusahaan yang beroperasi dalam kawasan industri ▪ Jumlah pameran/ expo dalam skalaregional, nasional dan internasional 	32	96	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kebudayaan, Inovasi, Teknologi, Tepat Guna Informasi Dan Komunikasi Serta Kerjasama Regional ▪ Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi ▪ Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi ▪ Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah ▪ Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanaman Modal ▪ Perdagangan dan perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penanaman Modal ▪ Dinas Perindag
			Rp 511,31 milyar US\$ 75,88 juta	Rp 986,54 milyar US\$162,61 juta			
			32	96			
			5-7 hr	3-5 hr			
			1	3			
			0	1			
			60	65			
			10	14			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional, nasional dan internasional ▪ Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan terpadu lainnya 					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan Dan Pengamanan Perdagangan ▪ Pengembangan Sentra Industri Potensial ▪ Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pk-5) Dan Asongan 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 menjadi 20% ▪ Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2015 menjadi 3,7% ▪ Menurunnya rasio ketergantungan Meningkatkan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup minimum tahun 2015 menjadi Rp 1,77 Juta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pasar lapangan kerja daerah ▪ Meningkatkan kualitas hubungan industrial ▪ Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi angkatan kerja ▪ Jumlah pekerja yang ditempatkan ▪ Rasio tenaga kerja pada PMA/PMDN per seluruh PMA/PMDN ▪ angka sengketa pengusaha-pekerja ▪ Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur ▪ Rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk ▪ upah minimum regional (UMR) 	61,89%	62,28%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Hubungan Industrial Yang Standard/Ideal ▪ Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan ▪ Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ▪ Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga Yang Berkompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga Kerja ▪ Prindustrian ▪ Perdagangan ▪ Pemerintahan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Sosial Tenaga Kerja ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Badan Penelitian dan Pengembangan ▪ Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif ▪ Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya tahun 2015 menjadi 1.973 unit ▪ Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi ▪ Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja perbankan kepada UMKMK tumbuh rata-rata 14,6% per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah bank/non bank yang sehat ▪ Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi yang sehat ▪ Mendorong pengembangan dan penguatan sistem pendukung UMKK dari sektor permodalan oleh lembaga keuangan bank/nonbank 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah BPR/LKM aktif ▪ Jumlah bank dan cabang-cabangnya ▪ realisasi pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja perbankan kepada UMKMK 	6/238	12/470	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ▪ Program pengembangan sistem pendukung usahabagi UMKK ▪ Program peningkatan iklim usaha UMKK yang kondusif ▪ Pengembangan IKM ▪ Pengembangan Pemasaran Pariwisata 	Urusan Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKK
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang, menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota maupun SKPD berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan terpadu ▪ Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran ▪ Tersedianya data dan informasi perencanaan kota ▪ Diterapkannya system informasi manajemen barang dan asset daerah ▪ Meningkatnya kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota • Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan strategis • Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana pembangunan kota 5 tahunan tingkat kota ▪ Rencana pembangunan kota 5 tahunan tingkat SKPD ▪ Rencana pembangunan kota tahunan tingkat kota ▪ Rencana pembangunan kota tahunan tingkat SKPD ▪ Kebijakan umum dan prioritas program tahunan pembangunan kota ▪ Jumlah program RKP 	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan rencana tata ruang ▪ Pengembangan kota-kota menengah dan besar ▪ Perencanaan pembangunan daerah ▪ Perencanaan pembangunan ekonomi ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan ▪ Pemerintahan Umum ▪ Penanaman Modal ▪ Pertanian ▪ Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Dinas Pendapatan Daerah ▪ Dinas Perindustrian dan Pendapatan dan Kelautan ▪ Bagian Keuangan Setdakot Medan ▪ Badan Penanaman Modal ▪ Badan Penelitian dan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<p>pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ▪ Meningkatnya belanja daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi Rp 4,6 triliun ▪ Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah tahun 2015 menjadi 90% ▪ Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi Rp 4,1 triliun ▪ Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan ▪ Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2015 menjadi 32,12%. ▪ Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD ▪ Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD ▪ Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam APBD 	<p>berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan e-planning yang terintegrasi • Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif • Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah • Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota 	<p>yang diakomodir dalam renja SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah program renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD ▪ Jumlah program renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD ▪ Ketersediaan data & informasi perencanaan kota ▪ Penerapan sistem informasi manajemen barang & asset daerah ▪ Volume APBD ▪ Volume PAD ▪ Volume Dana Perimbangan ▪ Volume Lain-lain pendapatan yang sah ▪ Belanja untuk pelayanan dasar ▪ Belanja daerah dalam APBD ▪ Realisasi belanja daerah thd anggaran belanja daerah ▪ Pertumbuhan Pendapatan daerah dalam APBD ▪ Realisasi Pendapatan daerah (milyar) ▪ Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ▪ Realisasi PAD dibandingkan target PAD dalam RPJMD ▪ Proporsi belanja langsung dibandingkan belanja APBD 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>X</p> <p>Rp 2,3 T Rp 548 M</p> <p>Rp 1,2 T Rp 299 M</p> <p>Rp 1 T</p> <p>Rp 2,3 T</p> <p>>100%</p> <p>10%</p> <p>Rp 2.101 milyar</p> <p>26,1%</p> <p>>100%</p> <p>19,12%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>V</p> <p>Rp 4,6 T Rp 1,3 T</p> <p>Rp 2 T Rp 849 T</p> <p>Rp 1,7 T</p> <p>Rp 4,6 T</p> <p>>100%</p> <p>12,72%</p> <p>Rp 4.169 milyar</p> <p>32,12%</p> <p>>100%</p> <p>26,06%</p>	<p>prasarana wilayah dan Sumberdaya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang dan tatabangunan ▪ Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ▪ Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah ▪ Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 	<p>Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ▪ Kecamatan se-Kota Medan 	

7.2.4 Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

a. Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan program sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- (2) Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
- (3) Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- (4) Peningkatan Pengendalian Polusi
- (5) Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

b. Urusan Wajib Penataan Ruang dengan program sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan Ruang
- (2) Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- (4) Perencanaan Tata Ruang

c. Urusan Wajib Perumahan dengan program sebagai berikut:

- (1) Permukiman Layak Huni

d. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan program sebagai berikut:

- (1) Dukungan Kelancaran Pemilu
- (2) Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (3) Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- (4) Pencegahan Dini Dan Penaggulangan Korban Bencana Alam
- (5) Pendidikan Politik Masyarakat
- (6) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (7) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- (8) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- (9) Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu.

e. Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeawaian dan Persandian dengan program sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar
- (2) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- (3) Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (4) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan KDH

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 pada misi keempat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7.5. Misi Keempat:
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 2010-2030 ▪ Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 2010-2030 berbasis kecamatan ▪ Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB tahun 2015 menjadi 183,11% ▪ Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2015 menjadi 75,78% ▪ Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTRW. ▪ Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat ▪ Meningkatnya efektivitas implemmentasi pelaksanaan hukum lingkungan ▪ Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana amdal ▪ Meningkatnya luas wilayah perkotaan tahun 2015 menjadi 68,92% ▪ Menurunnya luas wilayah banjir tahun 2015 menjadi 3,77% ▪ Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2015 menjadi 2,32% ▪ Meningkatnya luas wilayah industry tahun 2015 menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kota sebagai kesatuan kawasan pendorong pertumbuhan regional, dan tempat tinggal yang berorientasi kebutuhan penduduk kota. ▪ Mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang tahun 2008-2028. ▪ Meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis ▪ Meningkatkan koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis ▪ Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman ▪ Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan ▪ Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih ▪ Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Perda RTRW Kota Medan 2010-2030 ▪ Penetapan Perda RDTR Kota Medan 2010-2030 ▪ rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB ▪ Persentase bangunan ber-IMB ▪ Ketersediaan perencanaan ▪ Jumlah perusahaan wajib amdal yang diawasi ▪ luas wilayah produktif ▪ luas wilayah industri ▪ luas wilayah banjir ▪ luas wilayah perkotaan ▪ volume sampah yang ditangani ▪ Jumlah daya tampung TPS ▪ Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih ▪ Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik ▪ Jumlah rumah tangga yang menggunakan telepon/HP ▪ permukiman yang tertata ▪ luasan lingkungan permukiman kumuh ▪ rumah layak huni ▪ Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang dikelola 	X	V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup ▪ Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup ▪ Peningkatan Pengendalian Polusi ▪ Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam ▪ Pemanfaatan Ruang ▪ Pengembangan Wilayah Perbatasan ▪ Pengendalian Pemanfaatan Ruang ▪ Perencanaan Tata Ruang ▪ Permukiman Layak Huni 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Hidup Penataan Ruang Penataan Ruang Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebersihan Kota Medan Badan Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<p>5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,027 ▪ Meningkatnya luas permukiman yang tertata ▪ Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh tahun 2015 menjadi 0,79% ▪ Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 2015 menjadi 82,46% ▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2015 menjadi 81,26% ▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2015 menjadi 99,44% ▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan telepon/HP ▪ Meningkatnya rasio rumah layak huni tahun 2015 menjadi 89,28% ▪ Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam ▪ Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pada 2 DAS. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghentikan kerusakan lingkungan hidup ▪ Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penegakan 24 okum lingkungan 						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang hewan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengendalian masalah sosial ▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanganan, dan pemulihan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Kriminalitas ▪ Angka Kriminalitas yang tertangani ▪ Jumlah demo ▪ Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk ▪ Jumlah Linmas per 10.000 penduduk ▪ Jumlah pos siskamling 	8.385	8.251	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan Kelancaran Pemilu ▪ Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Pemeliharaan Kanrantibmas Dan Pencegahan 	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.234	8.137			
			189	155			
			2,99	4,8			
			35,8	40,5			
			7,7	8,2			

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> berkaki empat ▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang IMB ▪ Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara ▪ Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi ▪ Menurunnya tingkat kriminalitas ▪ Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani ▪ Menurunnya jumlah demo ▪ Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 4,8 ▪ Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 40,5 ▪ Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan tahun 2015 menjadi 8,2 ▪ Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha ▪ Meningkatnya pembinaan politik daerah ▪ Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. 		<ul style="list-style-type: none"> per kelurahan ▪ Jumlah partai politik yang dibina ▪ Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina ▪ Waktu penyelesaian revisi perda tentang PSK dan PKL ▪ Waktu pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan ▪ Waktu pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki empat 	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Kriminal ▪ Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ▪ Pendidikan Politik Masyarakat ▪ Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan ▪ Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ▪ Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu 		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 1,02 ▪ Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama. ▪ Tersedianya pusat pembinaan religi keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesadaran religi masyarakat ▪ Meningkatkan kerukunan religi ▪ Menurunkan tingkat penggunaan obat-obat terlarang Meningkatkan koordinasi peningkatan keamanan dan ketentrangan masyarakat ▪ Meningkatkan jati diri sebagai kota religious ▪ Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama ▪ Meningkatkan dialog intern dan antar umat beragama ▪ Meningkatkan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan saling menghormati dalam kemajemukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tempat ibadah ▪ Pengembangan pusat dan pembinaan sosial keagamaan 	2.220	2.340	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan Kdh	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Agama dan Pendidikan

7.2.5 Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat kota, maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. **UrusanWajib Pendidikan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pendidikan Anak Usia Dini
 - (2) Pendidikan Menengah
 - (3) Pendidikan Non Formal
 - (4) Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - (5) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

- b. **Urusan Wajib Kesehatan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
 - (2) Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - (3) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - (4) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit
 - (5) Pengadaan ,Peningkatan Sarana & Prasarana Rs/Rs Jiwa/ Paru/ Mata
 - (6) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
 - (7) Perbaikan Gizi Masyarakat
 - (8) Prgram Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - (9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - (10)Upaya Kesehatan Masyarakat.

- c. **Urusan Wajib Kebudayaan** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - (2) Pengelolaan Keragaman Budaya
 - (3) Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - (4) Pengembangan Kemitraan
 - (5) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya
 - (6) Pengembangan Nilai Budaya
 - (7) Perluasan Pemasaran Pariwisata.

- d. **Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana** dengan program sebagai berikut:
 - (1) Keluarga Berencana
 - (2) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - (3) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualias Anak Dan Perempuan
 - (4) Pelayanan Kontrasepsi

- (5) Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Mandiri
 - (6) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - (7) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
 - (8) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
 - (9) Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
 - (10) Peningkatan Peranserta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - (11) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- e. **Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga** dengan program sebagai berikut:
- (1) Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
 - (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - (3) Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - (4) Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
 - (5) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - (6) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
 - (7) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- f. **Urusan Wajib Ketahanan Pangan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Diversifikasi Dan Peningkatan Ketahanan Pangan.
- g. **Urusan Wajib Perpustakaan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
- h. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan.
- i. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat** dengan Program Pengembangan Data dan Informasi Daerah.
- (1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - (2) Pembinaan Adat Budaya Masyarakat
 - (3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - (4) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - (5) Peningkatan Peranan Perempuan Di Perdesaan

- j. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** dengan program sebagai berikut:
- (1) Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar (Hari Madat, Hari Aids Se-Dunia, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Penyandang Cacat Nasional)
 - (2) Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - (3) Pemberdayaan Dan Perempuan
 - (4) Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
 - (5) Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - (6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - (7) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms, Termasuk Hiv/Aids
 - (8) Upaya Kesehatan Masyarakat
- k. Urusan Wajib Sosial** dengan program sebagai berikut:
- (1) Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH
 - (2) Fasilitasi Tenaga PSKS
 - (3) Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - (4) Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan Dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial
 - (5) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - (6) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - (7) Pembinaan Anak Terlantar
 - (8) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 pada misi kelima disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7.5 Misi Kelima:
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat kemiskinan tahun 2015 menjadi 4,58%. Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2015 Menurunnya ketimpangan kemakmuran Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya yang diterima 40% penduduk lapisan bawah Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS) Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS. Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kurang mampu Memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat kurang mampu dalam pembangunan kota Meningkatkan akses dan penguatan usaha ekonomi masyarakat kurang mampu Meningkatkan stabilisasi harga bahan pangan Meningkatkan keamanan pangan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemiskinan Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan Ketimpangan kemakmuran Pendapatan khususnya yang diterima 40% penduduk lapisan bawah Terpenuhinya kecukupan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS) Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 	9,58%	4,58%	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pembinaan Adat Budaya Masyarakat Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH Fasilitasi Tenaga PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat
			90,42%	95,42%			
			0,29	0,26			
			32%	35%			
			339 ton	113,22 ton			
			V	V			
			V	V			
			0	1			
			70%	85%			

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
					<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan Dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial • Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) • Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Pembinaan Anak Terlantar • Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo • Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Traum • Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar (Hari Madat, Hari Aids Se-Dunia, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Penyandang Cacat Nasional) 		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan anak usia dini tahun 2015 menjadi 80,10% • Meningkatnya persentase penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf tahun 2015 menjadi 99,89% • Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A tahun 2015 menjadi 116,82% • Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B tahun 2015 menjadi 110,89% • Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 107,85% • Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A tahun 2015 menjadi 97,12% • Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tahun 2015 menjadi 82,4% • Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 70,06% • Menurunnya angka putus sekolah SD/MI tahun 2015 menjadi 0,08% • Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2015 menjadi 0,32% • Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 0,78% 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemerataan perluasan akses pendidikan • Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan • Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penduduk usia 4-6 tahun yang mengenyam pendidikan pra sekolah ▪ penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf ▪ Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A ▪ Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B ▪ Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C ▪ Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A ▪ Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs Paket B ▪ Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/SMK/MA/Paket C ▪ Angka Putus Sekolah SD/MI ▪ Angka Putus Sekolah SMP/MTs ▪ Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA ▪ Angka Kelulusan SD/MI ▪ Angka Kelulusan SMP/MTs ▪ Angka Kelulusan SMA/SMK/MA ▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ▪ Proporsi Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi 	59,36%	80,10%	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak Usia Dini • Pendidikan Menengah • Pendidikan Non Formal • Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan • Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Peningkatan Kualitas Pendidikan 	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka kelulusan SD/MI tahun 2015 menjadi 99,99% • Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2015 menjadi 98,94% • Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,08% • Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2015 menjadi 101,96% • Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,76% • Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. • Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi tahun 2015 menjadi 89,30% • Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah • Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan • Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 0,01% 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar ▪ rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah ▪ Rasio Guru : Murid jenjang pendidikan dasar ▪ Rasio Guru : Murid jenjang pendidikan menengah ▪ Rasio Guru : Murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan dasar ▪ Rasio Guru : Murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan menengah 	1 : 336	1 : 331			
			1 : 337	1 : 356			
			1 : 19	1 : 14			
			1 : 34	1 : 30			
			1 : 34	1 : 34			
			1 : 34	1 : 30			

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 0,04% • Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 30,79% • Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 33,55% • Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 5% • Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 7,14% • Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 3,33% • Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 3,33% 							

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani tahun 2015 menjadi 80,04% • Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015 menjadi 82,61% • Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization tahun 2015 menjadi 100% • Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2015 menjadi 100% • Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun 2015 menjadi 100% • Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program 35se vaksin • Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2015 menjadi 1.474 unit • Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 2015 menjadi 7,73% • Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,4% • Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,33% • Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 1,22% • Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat • Meningkatkan akses, cakupan, dan kualitas layanan jaminan kesehatan masyarakat • Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengendalian penyakit menular • Meningkatkan program kesehatan untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ▪ Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ▪ Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> ▪ Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan ▪ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA ▪ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ▪ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ▪ Cakupan kunjungan bayi ▪ Ketersediaan obat generik 35sencial, obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program dan vaksin ▪ Jumlah Posyandu Aktif ▪ Rasio Posyandu per Satuan Balita ▪ Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk ▪ Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk ▪ Rasio Dokter per Satuan Penduduk ▪ Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk ▪ Angka Kelangsungan Hidup Bayi 	55,8%	80%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemitraan ▪ Peningkatan Pelayanan Kesehatan ▪ Obat dan Perbekalan Kesehatan ▪ Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ▪ Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ▪ Pengadaan ,Peningkatan Sarana & Prasarana Rs/Rs Jiwa/ Paru/ Mata ▪ Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak ▪ Perbaikan Gizi Masyarakat ▪ Program Peningkatan Sumber Daya Manusia ▪ Standarisasi Pelayanan Kesehatan ▪ Upaya Kesehatan Masyarakat ▪ Upaya Kesehatan Masyarakat 	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RSUD Dr.Pirngadi Medan ▪ Dinas Kesehatan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi tahun 2015 menjadi 0,2 • Meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2015 menjadi 72,8 tahun • Menurunnya jumlah balita gizi buruk tahun 2015 menjadi 200 anak • Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet) • Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A • Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup • Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI • Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA tahun 2015 menjadi 100% • Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2015 menjadi 100% • Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2015 menjadi 100% 	•	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka Usia Harapan Hidup ▪ jumlah balita gizi buruk ▪ Cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet) ▪ Anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A ▪ Cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup ▪ Bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI 	71,55 312 80% 80% 71,7 1.000 25%	73,7 200 90% 90% 72,8 200 55%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ▪ Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms, Termasuk Hiv/Aids 		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 46 unit • Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk • Meningkatnya jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk • Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk • Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota • Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional. • Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional. • Meningkatnya jumlah PKK aktif tahun 2015 menjadi 173 unit • Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan • Meningkatnya luas lahan bersertifikat • Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan pembinaan kelembagaan pemuda • Meningkatkan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda • Meningkatkan pembinaan olah raga berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk ▪ Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk ▪ partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota ▪ Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional yang diraih ▪ Jumlah PKK aktif ▪ Penduduk yang memiliki lahan ▪ Luas lahan bersertifikat ▪ Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ▪ Efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) ▪ Efektivitas, fungsi dan peran organisasi keolahragaan ▪ jumlah kegiatan olahraga ▪ Modal sosial budaya ▪ Efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik ▪ survei kepuasan masyarakat/ survei pelayanan umum ▪ Fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat 	0,081	0,91	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga • Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba • Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda • Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga • Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Peningkatan Sarana Dan Prasarana OR • Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 	Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			0,003	0,004			
			V	V			
			V	V			
			173	173			
			151	151			
			70%	75%			
			65%	70%			
			8	36			
			V	V			
			X	V			
			X	V			

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK • Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) • Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan • Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi keolahragaan • Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015 menjadi 36 kegiatan • Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga • Meningkatnya modal sosial budaya • Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik • Terlaksananya survei kepuasan masyarakat/ survey pelayanan umum secara periodik • Meningkatnya fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota 							

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2015 menjadi 46 unit • Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 153 unit • Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat. • Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya • Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 56.155 unit • Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 menjadi 176.737 orang. • Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 15 unit. • Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2015 menjadi 153 kegiatan. • Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya • Meningkatnya ketahanan budaya lokal • Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal • Mengembangkan kelembagaan terpadu pengelolaan cagar budaya dan kawasan bersejarah • Meningkatkan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya • Meningkatkan minat dan budaya gemar baca masyarakat • Meningkatkan jati diri masyarakat berbasis keragaman nilai budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ▪ Jumlah grup kesenian ▪ jumlah gedung kesenian ▪ Jumlah kunjungan wisatawan ▪ Jumlah festival seni dan budaya ▪ Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya ▪ Jumlah restoran ▪ Jumlah hotel ▪ Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ▪ Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah ▪ Jumlah pengunjung perpustakaan daerah ▪ Jumlah perpustakaan 	<p>40 unit</p> <p>29</p> <p>3</p> <p>161.472</p> <p>24</p> <p>20</p> <p>819</p> <p>170</p> <p>6</p> <p>38.354 unit</p> <p>15.870</p> <p>30</p>	<p>46 unit</p> <p>250</p> <p>25</p> <p>176.737</p> <p>40</p> <p>30</p> <p>1.064</p> <p>205</p> <p>15</p> <p>56.155 unit</p> <p>27.756</p> <p>31</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kekayaan Budaya • Pengelolaan Keragaman Budaya • Pengembangan Destinasi Pariwisata • Pengembangan Kemitraan • Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya • Pengembangan Nilai Budaya • Perluasan Pemasaran Pariwisata • Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 	<p>Kebudayaan</p> <p>Perpustakaan</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Kantor Perpustakaan</p>

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
keragaman, kreatifitas seni dan budaya <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketersediaan restoran tahun 2015 menjadi 1.422 unit • Meningkatnya ketersediaan perhotelan tahun 2015 menjadi 229 unit • Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat • Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 25.510 orang • Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 2 unit 							

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2015 menjadi 4,98% • Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2015 menjadi 95,02% • Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2015 menjadi 391.754 orang • Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 70,19% • Meningkatnya jumlah peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 412.284 orang • Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga • Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2015 menjadi 2 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan kota • Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Meningkatkan perspektif gender dalam proses pembangunan kota • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana • Meningkatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan ▪ Partisipasi perempuan di lembaga swasta ▪ Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas ▪ Angkatan Kerja perempuan ▪ Prevalensi peserta KB aktif ▪ Jumlah peserta KB aktif ▪ Partisipasi angkatan kerja perempuan ▪ Rasio kekerasan dalam rumah tangga ▪ Jumlah anak per keluarga ▪ Rasio Akseptor KB ▪ Peserta KB baru 	<p>22,32%</p> <p>21,2%</p> <p>95,19%</p> <p>191.336</p> <p>343.473</p> <p>58,37%</p> <p>70,19%</p> <p>255.996</p> <p>354.823</p> <p>2-3</p> <p>2,17</p>	<p>25%</p> <p>24%</p> <p>95,02%</p> <p>210.234</p> <p>364.306</p> <p>70%</p> <p>70,19%</p> <p>412.284</p> <p>391.754</p> <p>2</p> <p>2,12</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berencana • Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) • Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualias Anak Dan Perempuan • Pelayanan Kontrasepsi • Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kbkkr Yang Mandiri • Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak • Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr • Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak • Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan • Peningkatan Peranserta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera ▪ Pemerintah an Umum 	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p> <p>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</p>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga • Pemberdayaan Dan Perempuan • Keluarga Berencana • Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) • Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualias Anak Dan Perempuan • Pelayanan Kontrasepsi • Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kbkkr Yang Mandiri • Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak • Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr • Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2011-2015**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2015)			
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan • Peningkatan Peranserta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan • Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 		

7.3 Pengembangan Wilayah

Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan arahan pengembangannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2010-2030 khususnya pada bagian rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Medan telah tergambarkan salah satunya dalam bentuk rencana sistem pusat-pusat pelayanan yang merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi:

- a. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota;

Dengan mempertimbangkan kriteria lokasi dalam penentuan pusat dan sub pusat pelayanan maka lokasi pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan Kota Medan diarahkan sebagai berikut:

7.3.1 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota Medan

Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota Medan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota, dan pusat pelayanan ekonomi, meliputi 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota Medan antara lain:

- Kecamatan Medan Polonia;
- Kecamatan Medan Maimun;
- Kecamatan Medan Baru (Kelurahan Darat dan Petisah Hulu);
- Kecamatan Medan Petisah (Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip);
- Kecamatan Medan Barat (Kelurahan Kesawan dan Silalas);
- Kecamatan Medan Timur (Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang Buntu); dan
- Kecamatan Medan Kota (Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan Masjid).

Dalam rangka mendukung pengembangan pusat pelayanan kota di pusat kota maka dibutuhkan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkaran luar dan tengah, pengembangan terminal terpadu, pembangunan *city check in*, penataan batas kawasan lindung dan pengadaan lahan untuk kawasan lindung, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan jaringan listrik, peningkatan pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penanganan masalah persampahan, peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal, pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah pusat kota, pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder, penataan dan penertiban sektor informal dan pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.2 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di Bagian Utara Medan

Pusat Pelayanan Kota di Bagian Utara, terletak di antara Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan, tepatnya disekitar Masjid Raya Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional, pusat pelayanan transportasi; pusat kegiatan sosial – budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

Dalam rangka mendukung pengembangan pusat pelayanan kota di Bagian Utara maka dibutuhkan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkaran luar dan jalan lingkaran tengah, pembangunan jalan susur pantai trans Sumatera, pembangunan jalan lingkaran utara, pembangunan jalan lingkaran Marelan Sisi Barat, pembangunan jalan tol titik 0,0 menuju pelabuhan peti kemas, pembangunan terminal tipe A Belawan, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, pengembangan Medan Islamic Center, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba, pengadaan lahan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan fasilitas perdagangan, pembangunan pusat-pusat perdagangan skala regional, pembangunan kawasan industri, peningkatan fasilitas pendidikan, pembuatan buffer zone antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.3 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Belawan

Subpusat pelayanan kota Medan Belawan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor, pusat pelayanan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri dan pusat kegiatan perikanan, ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di stasiun kereta api Pelabuhan Belawan Lama.

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Belawan maka dibutuhkan pembangunan jalan susur pantai trans Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah, pengembangan terminal tipe A, reklamasi dan pengembangan pelabuhan hubungan internasional Belawan, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, pembangunan dan pemindahan terminal penumpang orang di Pelabuhan Belawan, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.4 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Labuhan

Subpusat pelayanan kota Medan Labuhan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan transportasi, dan pusat pelayanan kesehatan, ditetapkan di Kecamatan Medan Labuhan, tepatnya di persimpangan jalan Marelan Raya dan Jalan Yos Sudarso, diantara Kelurahan Pekan Labuhan dengan Kelurahan Martubung.

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Labuhan maka dibutuhkan pembangunan jalan susur pantai trans Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba, pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah,

pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.5 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Marelan

Subpusat pelayanan kota Medan Marelan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa kebutuhan pokok (pasar induk) dan pusat kegiatan rekreasi serta wisata, ditetapkan di Kecamatan Medan Marelan, tepatnya dipersimpangan Jalan Marelan Raya dan Jalan Rahmad Budin (Kelurahan Terjun);

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Marelan maka dibutuhkan pengembangan kawasan wisata yang dapat dikembangkan juga sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang meliputi *theme park*, *water front city* dan Danau Siombak, pembebasan lahan untuk perluasan TPA Terjun, pembangunan jalan susur pantai trans Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkaran luar dan jalan lingkaran tengah, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba, pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.6 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Perjuangan

Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga, ditetapkan di Kecamatan Medan Tembung tepatnya di sekitar aksara, meliputi Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung;

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Perjuangan maka dibutuhkan pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas

pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.7 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Area

Subpusat pelayanan kota Medan Area yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi, ditetapkan di Kecamatan Medan Amplas tepatnya di sekitar persimpangan terminal Amplas, Kelurahan Timbang Deli, meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Kota (kecuali Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan Masjid);

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Area maka dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.8 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Helvetia

Subpusat pelayanan kota Medan Helvetia yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan transportasi wilayah bagian Barat, dan pusat kegiatan sosial-budaya, ditetapkan di Kecamatan Medan Helvetia tepatnya di Jalan Asrama, antara rel Kereta Api dan Jalan Gaperta, meliputi Kecamatan Medan Petisah (kecuali Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip) serta pusat pelayanan pertahanan keamanan;

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Helvetia maka dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas perdagangan dan jasa, pengembangan stasiun kereta api, pembangunan rel kereta api tidak sebidang, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi

saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.9 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Selayang

Subpusat pelayanan kota Medan Selayang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan, ditetapkan di Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sekitar simpang Pemda, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Baru (kecuali Kelurahan Darat dan Petisah Hulu), Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor;

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Selayang maka dibutuhkan penataan dan penertiban sektor informal, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.

7.3.10 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan Timur

Subpusat pelayanan kota Medan Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat pelayanan transportasi (TOD), dan pusat kegiatan sosial-budaya, ditetapkan di Kecamatan Medan Timur tepatnya disekitar jembatan layang Pulo Brayan, meliputi Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Timur (kecuali Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang Buntu), Kecamatan Medan Barat (kecuali Kelurahan Kesawan dan Silalas) serta pusat pelayanan pertahanan keamanan.

Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota Medan Timur maka dibutuhkan penataan dan penertiban sektor informal, pembangunan rel kereta api tidak sebidang, pembangunan rel kereta api, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan

lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, pembuatan *buffer zone* antara kawasan khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah *mixed use*.